

Manfaat Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kampung Besum

Aksamina Fonataba, Avelinus Lefaan*, Albertina Nasri Lobo

Program Magister Sosiologi, Universitas Cenderawasih, Indonesia

*E-mail Korespondensi: avelefaan11829@gmail.com

ABSTRACT:

This study aims to analyze the benefits of the Village Fund on improving community welfare in Besum Village, Jayapura Regency, and identify factors that influence the effectiveness of its use. This research uses a descriptive quantitative approach with the research location in Besum Village. Data collection techniques include in-depth interviews, and direct observation. Data analysis was conducted using descriptive statistics and content analysis to comprehensively combine quantitative and qualitative findings. The results showed that the utilization of the Village Fund in Besum Village has had a significant impact on community welfare, especially in the sectors of infrastructure development, basic services (health and education), and local economic empowerment. The active participation of the community in the village deliberation also encourages targeted program planning. However, challenges remain in terms of the capacity of village officials, delays in fund disbursement, and weak monitoring and reporting. The conclusion of this research is that the Village Fund has great potential in improving the quality of life of the community if managed with the principles of transparency, accountability, and active participation of citizens. Therefore, it is recommended that local governments improve technical training for village officials and strengthen participatory monitoring systems to ensure that the Village Fund is used optimally and sustainably.

Keywords: Village Funds, Kampung Besum, Community Welfare, Participation, Village Development

Received: 26-04-2025

Accepted: 24-05-2025

Published: 03-06-2025

1. PENDAHULUAN

Setiap Dana desa merupakan salah satu program strategis yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dalam konteks Kampung Besum, Kabupaten Jayapura, pemanfaatan dana desa sangat krusial, mengingat kondisi geografis yang menantang serta struktur sosial ekonomi masyarakat yang masih memerlukan perhatian khusus. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayapura, tingkat kemiskinan di daerah ini mencapai 25,3% pada tahun 2022, angka yang mencerminkan perlunya intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari penduduk di Kampung Besum hidup

dalam kondisi yang memprihatinkan, sehingga akses terhadap sumber daya dan layanan dasar menjadi sangat terbatas.

Penggunaan dana desa di Kampung Besum diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal. Misalnya, pembangunan jalan desa yang baik tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap pasar dan layanan publik, tetapi juga dapat meningkatkan mobilitas barang dan jasa. Dengan adanya jalan yang layak, petani dapat lebih mudah menjual hasil pertanian mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan mereka. Liani, dkk (2024) menunjukkan bahwa infrastruktur yang baik berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial di desa-desa yang menerima dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan juga menjadi salah satu fokus penggunaan dana desa. Di Kampung Besum, akses terhadap layanan kesehatan sering kali terbatas, baik karena jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan maupun kurangnya tenaga medis. Dengan alokasi dana desa yang tepat, pemerintah desa dapat membangun fasilitas kesehatan yang lebih dekat dan meningkatkan jumlah tenaga medis yang tersedia. Sebagai contoh, pengadaan posyandu dan klinik desa yang dilengkapi dengan peralatan medis dasar dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan demikian, kesehatan masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif pada produktivitas dan kualitas hidup mereka.

Pengembangan ekonomi lokal juga merupakan aspek penting dari pemanfaatan dana desa. Dengan memanfaatkan dana desa untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Kampung Besum dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran. Misalnya, jika dana desa digunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat dalam bidang kerajinan tangan atau pertanian modern, maka masyarakat akan memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, dukungan terhadap pemasaran produk lokal melalui pameran atau bazar desa dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat desa.

Namun, meskipun dana desa di Kampung Besum Distrik Namblong Kabupaten Jayapura telah dialokasikan, masih terdapat tantangan signifikan dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, transparansi penggunaan dana, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan menjadi isu yang perlu diatasi. Misalnya, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan dana desa dapat mengakibatkan penggunaan dana yang tidak efisien

atau bahkan penyalahgunaan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan kepada aparat desa dan masyarakat terkait pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel.

Transparansi dalam penggunaan dana desa juga menjadi isu krusial. Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek yang menggunakan dana desa. Dengan adanya partisipasi masyarakat, mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap proyek tersebut, sehingga akan lebih aktif dalam pengawasan dan evaluasi. Misalnya, jika masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai proyek pembangunan infrastruktur, mereka akan lebih termotivasi untuk menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun. Hal ini akan menciptakan rasa kepemilikan yang kuat di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada keberlanjutan proyek tersebut.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan juga sangat penting. Pemerintah desa perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai dampak dari penggunaan dana desa. Melalui penelitian ini, kita dapat mengidentifikasi keberhasilan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan dana desa di Kampung Besum, Kabupaten Jayapura, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur yang baik, peningkatan layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal, dana desa dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tantangan dalam pelaksanaan dana desa, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan transparansi penggunaan dana, perlu diatasi dengan serius. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta melakukan evaluasi secara berkala, pemanfaatan dana desa dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang diharapkan.

Pentingnya evaluasi dan monitoring berkelanjutan dalam pengelolaan Dana Desa. Meskipun sebagian besar program telah menunjukkan realisasi yang memuaskan, terdapat perbedaan persentase realisasi antar program yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan di masa depan. Hidayat dan Firmansyah (2019) menyatakan bahwa keberhasilan penggunaan dana desa juga ditentukan oleh mekanisme pengawasan dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan. Dengan meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi, diharapkan pengalokasian dan penggunaan dana desa di Kampung Besum dapat semakin optimal serta berdampak signifikan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena memberikan dasar empiris dan teoretis untuk memahami dampak langsung alokasi dana desa terhadap peningkatan

kualitas hidup masyarakat lokal. Dengan kondisi keterbatasan sumber daya dan tantangan pembangunan di daerah terpencil, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang berkontribusi pada efektivitas penggunaan dana desa serta mengungkap kendala yang menghambat realisasi manfaat optimal bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini berpotensi memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan dana desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel, sesuai dengan temuan-temuan sebelumnya yang menekankan peran pengawasan dan evaluasi dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran desa.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam melalui penggalan data kualitatif yang bersifat naratif. Sebagaimana diuraikan oleh Sugiyono (2017) penelitian kualitatif cocok digunakan untuk mengkaji makna, pemahaman, serta perspektif subjek dalam konteks tertentu secara holistik. Pendekatan ini juga didukung oleh Neuman (2014), yang menyatakan bahwa metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi proses sosial dan dinamika yang tidak dapat diukur secara statistik, melainkan dipahami melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Besum, Kabupaten Jayapura, Papua. Lokasi ini dipilih karena karakteristiknya yang mencerminkan komunitas adat dengan penerapan Dana Desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan, mulai dari Januari hingga Juni 2024, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kampung Besum, termasuk perangkat desa, kepala kampung, tokoh adat, dan warga yang menerima manfaat Dana Desa. Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014) teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih responden yang memiliki informasi relevan sesuai tujuan penelitian. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu, seperti keterlibatan langsung dalam pengelolaan Dana Desa atau pengalaman sebagai penerima manfaat. Diperkirakan jumlah sampel yang diambil adalah 20 hingga 25 orang, terdiri dari berbagai kelompok untuk memastikan representasi yang memadai, baik dari aparat kampung sebagai pelaksana dari kebijakan dana desa di kampung, maupun masyarakat kampung yang merupakan penerima manfaat dari dana desa tersebut.

Untuk mendapatkan data yang relevan dan mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. *Pertama*, wawancara dilakukan

secara mendalam (in-depth interview) kepada perangkat desa, kepala kampung, tokoh adat, dan warga masyarakat. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Panduan wawancara disusun untuk memastikan keterpaduan informasi yang diperoleh. *Kedua*, Observasi yang dilakukan untuk mengamati langsung penggunaan Dana Desa di Kampung Besum, seperti pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat, dan interaksi sosial. Observasi ini bertujuan untuk melengkapi data dari wawancara dan kuesioner dengan mencatat fenomena yang terjadi di lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik, yakni proses untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan pola makna (tema) dari data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Proses ini mencakup tahap koding terbuka, koding aksial, dan penyusunan tema utama secara induktif, tanpa bergantung pada hipotesis awal. Analisis dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data agar pemahaman terhadap fenomena tetap kontekstual dan mendalam (Braun & Clarke, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemanfaatan Dana Desa di Kampung Besum untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

1. Mekanisme alokasi dan penyaluran Dana Desa

Mekanisme alokasi dan penyaluran Dana Desa merupakan proses krusial dalam memastikan efektivitas pemanfaatan dana tersebut bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung, termasuk di Kampung Besum. Alokasi Dana Desa ditentukan berdasarkan formula yang mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, yang kemudian disalurkan melalui rekening kas desa secara bertahap sesuai ketentuan regulasi (Kementerian Keuangan RI, 2023). Di Kampung Besum, pemanfaatan Dana Desa diarahkan untuk mendukung program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pemanfaatan yang tepat sasaran sangat bergantung pada transparansi dalam perencanaan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan bersama antara pemerintah kampung dan pihak pendamping. Menurut Sujarwoto (2017), keberhasilan Dana Desa dalam mendorong kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan kemampuan kelembagaan desa dalam mengelola sumber daya secara akuntabel dan partisipatif. Oleh karena itu, mekanisme alokasi dan penyaluran yang efisien menjadi fondasi penting bagi terciptanya manfaat nyata Dana Desa bagi masyarakat kampung.

Mekanisme alokasi dan penyaluran Dana Desa merupakan aspek fundamental dalam memastikan pembangunan desa berjalan secara adil dan

berkelanjutan. Alokasi anggaran desa ditentukan melalui formula nasional yang memperhitungkan indikator seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis, yang mana ini sangat relevan bagi desa-desa terpencil seperti Kampung Besum (Kementerian Keuangan RI, 2023). Setelah dialokasikan, penyaluran dana dilakukan secara bertahap ke rekening kas desa dengan prasyarat administrasi dan pelaporan yang ketat guna menjamin akuntabilitas. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi kendala teknis seperti keterlambatan pencairan dari pusat dan lemahnya kapasitas administrasi desa, yang dapat menghambat efektivitas penyaluran. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan struktural dan pelatihan teknis untuk memperkuat tata kelola keuangan desa, sebagaimana disarankan oleh World Bank (2020) dalam evaluasinya terhadap pelaksanaan Dana Desa di Indonesia.

Pemanfaatan Dana Desa di Kampung Besum diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui program-program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, layanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis lokal. Efektivitas pemanfaatan sangat bergantung pada perencanaan partisipatif dan pengawasan berkelanjutan, yang memungkinkan program desa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat (Sujarwoto, 2017). Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam musyawarah dan penyusunan rencana kerja, alokasi dana menjadi lebih kontekstual dan tepat sasaran. Meskipun demikian, tantangan dalam kapasitas pengelolaan dan pelaporan dana di tingkat kampung menimbulkan risiko terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Maka dari itu, penguatan kelembagaan desa dan digitalisasi sistem keuangan desa menjadi strategi penting dalam memastikan Dana Desa benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

2. Program-program Dana Desa yang mendukung kesejahteraan

Program-program Dana Desa merupakan salah satu instrumen strategis dalam pembangunan berbasis komunitas yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Di Kampung Besum, pemanfaatan Dana Desa diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penguatan layanan sosial, yang secara langsung mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, alokasi dana tersebut tidak hanya memfasilitasi pembangunan fisik seperti jalan dan fasilitas air bersih, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan kelompok usaha masyarakat, dan perlindungan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Sutiyo dan Maharjan (2017) yang menyatakan bahwa Dana Desa berperan penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan desa dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal. Dengan tata kelola yang baik dan kolaborasi lintas aktor, pemanfaatan Dana Desa di Kampung Besum mencerminkan

upaya konkret pemerintah dalam menanggulangi ketimpangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah perdesaan.

Pemanfaatan Dana Desa di Kampung Besum menunjukkan bahwa program ini menjadi instrumen strategis dalam memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Fokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti saluran air bersih dan jalan lingkungan secara langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam akses terhadap air bersih dan mobilitas. Selain fungsi infrastruktur, keberhasilan ini tidak terlepas dari proses perencanaan yang inklusif dan transparan melalui musyawarah kampung yang memungkinkan masyarakat menyuarakan kebutuhannya secara langsung. Hal ini sejalan dengan temuan Vel et al. (2020) bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan memperkuat kepercayaan sosial terhadap pemerintah kampung. Ketika Dana Desa dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik, program-program yang dihasilkan lebih adaptif terhadap tantangan lokal dan mampu merespon kebutuhan paling mendasar masyarakat desa secara konkret.

Pemanfaatan Dana Desa di Kampung Besum mencerminkan transformasi pembangunan desa yang tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga pada penguatan modal sosial dan ekonomi masyarakat. Program pelatihan keterampilan dan pembentukan kelompok usaha masyarakat seperti simpan pinjam perempuan berperan penting dalam mendorong kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar. Inisiatif-inisiatif ini menciptakan ruang produktif bagi kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda desa untuk turut berperan dalam pembangunan ekonomi lokal, yang mendukung capaian SDGs di tingkat akar rumput. Dalam hal ini, Dana Desa terbukti bukan hanya sebagai alat pembangunan, tetapi juga sebagai medium pemberdayaan sosial yang memperkuat kapasitas kelembagaan desa (Sutiyo & Maharjan, 2017). Jika dikelola secara berkelanjutan, Dana Desa dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan resilien terhadap dinamika sosial dan ekonomi global.

3. Evaluasi dampak program Dana Desa terhadap kesejahteraan

Evaluasi terhadap dampak program Dana Desa menjadi krusial dalam mengukur sejauh mana intervensi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kampung, termasuk di Kampung Besum. Program Dana Desa yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan sosial dasar, serta pemberdayaan ekonomi lokal harus diukur tidak hanya dari sisi serapan anggaran, tetapi juga dari aspek perubahan nyata dalam kualitas hidup warga. Menurut Sutiyo dan Maharjan (2017), efektivitas Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, tata kelola yang baik, serta integrasi kebutuhan lokal ke dalam perencanaan pembangunan. Di Kampung Besum, keberhasilan pemanfaatan Dana Desa dapat dievaluasi melalui indikator seperti akses terhadap air bersih, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta peningkatan pendapatan rumah tangga.

Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berperan sebagai mekanisme akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana perbaikan berkelanjutan dalam implementasi kebijakan berbasis desa.

Evaluasi dampak program Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung Besum perlu dilihat sebagai bagian integral dari tata kelola pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dan partisipatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Sutiyo dan Maharjan (2017), keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi dari transformasi nyata dalam kehidupan masyarakat seperti peningkatan layanan dasar, aksesibilitas, dan penguatan ekonomi lokal. Wawancara dengan warga Kampung Besum menunjukkan bahwa sejak adanya Dana Desa, terjadi perbaikan signifikan dalam aspek infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan kampung dan sumur bor, yang sebelumnya menjadi hambatan utama dalam aktivitas sosial dan ekonomi warga. Hal ini selaras dengan pendapat Antlöv et al. (2016) bahwa Dana Desa efektif meningkatkan kualitas hidup jika diarahkan pada kebutuhan prioritas lokal yang dirumuskan melalui musyawarah. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknokratik, tetapi juga sebagai medium reflektif yang memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa tetap adaptif terhadap aspirasi masyarakat.

Dampak program Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat Besum juga terlihat dari munculnya kembali aktivitas produktif seperti kelompok tani yang mulai aktif setelah menerima dukungan dalam bentuk alat pertanian dan bibit. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal, salah satu pilar utama Dana Desa menurut Kementerian Desa PDTT (2020), mulai terwujud di tingkat kampung melalui kegiatan berbasis potensi lokal. Meskipun informan menekankan bahwa belum semua kebutuhan masyarakat terpenuhi, peningkatan dalam aspek kesehatan, akses ekonomi, dan partisipasi produktif warga merupakan indikator awal yang signifikan dari perbaikan kesejahteraan. Penelitian oleh Suriadi (2021) juga memperkuat bahwa keberhasilan program ini ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, agar program tidak sekadar menjadi proyek *top-down* yang kehilangan relevansi lokal. Dengan demikian, evaluasi dampak Dana Desa di Besum harus terus dilakukan secara periodik dan berbasis data partisipatif agar mampu menjadi alat ukur sekaligus panduan perbaikan kebijakan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan Dana Desa merupakan elemen krusial dalam menjamin keberhasilan pemanfaatan dana tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kampung Besum. Melibatkan warga sejak tahap perencanaan memungkinkan program pembangunan desa lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, memperkuat rasa memiliki (*ownership*), serta

mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Sebagaimana ditegaskan oleh Pranadji (2016), partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa meningkatkan efektivitas program karena keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi kolektif warga. Di Kampung Besum, model partisipatif ini dapat memperkuat hasil-hasil pembangunan, seperti akses layanan dasar, peningkatan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat desa. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat (*community-driven development*) yang telah terbukti meningkatkan keberlanjutan program desa (World Bank, 2014).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan Dana Desa merupakan pilar utama dalam menjamin efektivitas program pembangunan di tingkat desa, sebagaimana terlihat di Kampung Besum. Pelibatan warga sejak tahap awal perencanaan, seperti yang terjadi melalui forum musyawarah kampung, memungkinkan setiap usulan kegiatan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Proses ini tidak hanya memperkuat responsivitas program terhadap konteks lokal, tetapi juga membangun rasa memiliki yang tinggi dari warga terhadap hasil pembangunan, suatu kondisi yang dinilai sangat penting untuk keberlanjutan program (Chambers, 1994; Pranadji, 2016). Wawancara dengan warga menunjukkan bahwa mereka tidak hanya hadir secara fisik dalam musyawarah, tetapi juga aktif menyuarakan kebutuhan konkret, seperti pengadaan air bersih dan dukungan bagi usaha kecil, yang menunjukkan adanya proses deliberatif yang sehat dalam tata kelola desa. Model ini selaras dengan pendekatan *community-driven development* yang menurut Bank Dunia (2014) mampu mendorong transformasi sosial dan kesejahteraan melalui penguatan kapasitas lokal.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program Dana Desa di Kampung Besum juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap pemerintahan desa. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan, warga turut hadir dalam rapat pertanggungjawaban dan berani mengajukan pertanyaan serta masukan terhadap penggunaan dana, yang memperlihatkan adanya budaya partisipatif yang kuat dan berorientasi pada transparansi. Partisipasi aktif ini menjadi instrumen kontrol sosial yang efektif dan mendukung terciptanya pemerintahan desa yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (UNDP, 1997; Widianingsih, 2010). Keberadaan ruang-ruang dialog ini juga mendorong kolaborasi antara aparat kampung dan masyarakat, menciptakan relasi sosial yang lebih seimbang dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat bukan hanya berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan, tetapi juga dalam menjamin bahwa pemanfaatan Dana Desa benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

5. Kendala dan solusi pemanfaatan Dana Desa

Pemanfaatan Dana Desa di Kampung Besum untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, seperti rendahnya kapasitas aparatur kampung, lemahnya perencanaan partisipatif, dan minimnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Hal ini sering menghambat efektivitas penggunaan dana yang seharusnya difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Sutiyo dan Maharjan (2017), keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat desa menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan Dana Desa yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan penguatan sistem pelatihan teknis bagi aparat kampung, pendampingan intensif dari pemerintah daerah, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan hingga evaluasi program. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* dan pengembangan berbasis masyarakat (*community-based development*) yang menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (World Bank, 2014), sehingga Dana Desa benar-benar menjadi instrumen strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung Besum secara berkelanjutan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemanfaatan Dana Desa di Kampung Besum untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kultural yang saling berkaitan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kapasitas aparatur kampung dalam aspek perencanaan, administrasi, dan pengelolaan anggaran secara akuntabel, yang menyebabkan pelaksanaan program kerap tidak tepat sasaran dan pelaporannya tertunda. Seperti diungkapkan oleh informan penelitian, sering kali perencanaan dilakukan tanpa keterlibatan menyeluruh masyarakat, sehingga banyak program tidak mencerminkan kebutuhan riil warga. Hal ini sejalan dengan temuan Sutiyo dan Maharjan (2017), yang menekankan bahwa lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia desa menjadi penghambat signifikan dalam upaya implementasi Dana Desa yang efektif. Tanpa adanya sistem manajemen partisipatif yang kuat, Dana Desa justru berisiko menjadi simbol program yang formalistik tanpa memberi dampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Sebagai solusi, pendekatan yang menekankan penguatan kapasitas, partisipasi warga, dan pendampingan berkelanjutan mulai menunjukkan hasil positif di Kampung Besum. Informan menyebut bahwa pelibatan tokoh adat dan pemuda dalam musyawarah desa, serta adanya pelatihan dari pendamping desa, membuat pemanfaatan dana lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti program bantuan ternak dan pemberdayaan ekonomi ibu-ibu. Strategi ini selaras dengan prinsip *good governance* dan pendekatan *community-based development* yang ditekankan oleh World Bank (2014), yang menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan

partisipasi aktif sebagai landasan tata kelola pembangunan desa. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah melalui pelatihan teknis dan monitoring rutin akan semakin memperkuat keberhasilan program-program Dana Desa. Dengan demikian, Dana Desa dapat menjadi instrumen strategis yang mampu mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan jika dijalankan dengan prinsip kolaboratif dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal.

3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Dana Desa di Kampung Besum

6. Faktor internal pengelolaan Dana Desa

Faktor internal pengelolaan Dana Desa merupakan elemen penting yang menentukan efektivitas pemanfaatan dana tersebut dalam pembangunan kampung. Di Kampung Besum, efektivitas penggunaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur kampung, tata kelola keuangan, serta kualitas perencanaan program pembangunan. Keterbatasan kompetensi teknis, lemahnya akuntabilitas, dan minimnya inovasi dalam perencanaan sering kali menjadi penghambat utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Sutiyo dan Maharjan (2017), keberhasilan implementasi Dana Desa sangat bergantung pada kualitas kelembagaan desa dan kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola keuangan dan menjalankan program secara transparan dan partisipatif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur kampung melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan sistem pengawasan internal menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan Dana Desa benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Efektivitas penggunaan Dana Desa di Kampung Besum sangat dipengaruhi oleh faktor internal pengelolaan, terutama yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola keuangan, serta mekanisme perencanaan pembangunan yang belum optimal. Informasi dari wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman aparatur kampung terhadap prosedur anggaran dan pelaporan menjadi salah satu penyebab utama lemahnya pengelolaan Dana Desa. Kurangnya koordinasi antar aparat desa dan rendahnya inisiatif kepala kampung dalam memimpin musyawarah perencanaan menyebabkan perencanaan program menjadi tidak partisipatif dan tidak terarah. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutiyo dan Maharjan (2017) yang menekankan bahwa keberhasilan Dana Desa bergantung pada kualitas institusi desa dan kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi administratif dan pengelolaan secara akuntabel. Apabila aspek ini tidak ditangani secara serius, maka penggunaan Dana Desa akan cenderung bersifat simbolik dan tidak menghasilkan perubahan signifikan bagi masyarakat.

Selain faktor kapasitas teknis, minimnya inovasi dalam merancang program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan lokal juga menjadi penghambat dalam

pengelolaan Dana Desa di Kampung Besum. Sebagaimana disampaikan informan, kegiatan kampung cenderung bersifat rutin tanpa mekanisme evaluasi yang jelas karena koordinasi internal yang lemah dan pemantauan program yang tidak sistematis. Hal ini menandakan bahwa sistem pengawasan internal belum berjalan optimal untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan Dana Desa berjalan sesuai perencanaan. Menurut Dwiyanto (2018), kelembagaan desa yang kuat ditandai oleh kemampuan aktor lokal untuk berinovasi, membangun akuntabilitas sosial, dan mengembangkan mekanisme evaluasi berbasis partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan melalui pelatihan, penguatan regulasi internal, dan penyediaan alat bantu perencanaan digital agar efektivitas penggunaan Dana Desa benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh warga Kampung Besum.

7. Sistem pengawasan dan akuntabilitas

Sistem pengawasan dan akuntabilitas memegang peranan sentral dalam menentukan efektivitas penggunaan Dana Desa, termasuk di Kampung Besum. Pengawasan yang lemah dan minimnya akuntabilitas berisiko mendorong praktik penyimpangan anggaran serta menurunkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan kampung. Dalam konteks tersebut, sistem pengawasan internal maupun eksternal perlu diperkuat guna menjamin keterbukaan informasi publik dan pelibatan warga dalam setiap tahapan perencanaan hingga evaluasi program. Menurut Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011), akuntabilitas pengelolaan dana publik di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh integritas aparatur, sistem pencatatan keuangan yang transparan, serta partisipasi masyarakat sebagai mekanisme kontrol sosial. Dengan demikian, efektivitas penggunaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh sistem pengawasan dan akuntabilitas yang berjalan secara konsisten dan partisipatif.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Sistem pengawasan dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam menjaga efektivitas penggunaan Dana Desa, karena menjadi mekanisme utama untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa setiap tahapan penggunaan dana berjalan sesuai prinsip transparansi dan partisipasi. Seperti di Kampung Besum, lemahnya akuntabilitas dan pengawasan internal terlihat dari minimnya informasi publik terkait alokasi dana serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam forum-forum musyawarah kampung. Kondisi ini sejalan dengan temuan Suhardjanto dan Yulianingtyas (2011) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh integritas aparatur, sistem pencatatan yang akurat, dan pengawasan partisipatif dari masyarakat. Ketika masyarakat tidak mendapatkan akses pada informasi anggaran, seperti melalui papan informasi atau laporan terbuka. Maka kontrol sosial tidak bisa berjalan secara optimal dan ini berisiko melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah kampung. Dalam konteks ini,

efektivitas Dana Desa tidak cukup ditopang oleh ketersediaan dana, melainkan oleh kekuatan sistem pengawasan yang konsisten dan berbasis partisipasi warga.

Hal ini diperkuat oleh testimoni warga Kampung Besum yang menyatakan bahwa selama ini pelaporan keuangan hanya terbatas pada informasi dari kepala kampung dan pendamping desa, tanpa mekanisme transparansi yang dapat diakses luas oleh masyarakat. Ketika tidak semua warga diundang dalam musyawarah kampung, atau papan informasi kegiatan tidak dipasang, hal ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas vertikal maupun horizontal dalam struktur pemerintahan desa. Studi oleh Hermana, dkk, (2021) juga menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat dalam pengawasan dana publik dapat meningkatkan efisiensi program dan mendorong keberlanjutan pembangunan berbasis kebutuhan riil warga. Maka, diperlukan reformulasi sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membangun budaya partisipatif, misalnya melalui publikasi rutin laporan dana desa, pelatihan literasi anggaran, dan forum dialog warga. Upaya penguatan akuntabilitas ini penting sebagai dasar memperbaiki efektivitas pengelolaan Dana Desa yang berorientasi pada kepentingan publik secara nyata dan inklusif.

8. Transparansi informasi dan sosialisasi Dana Desa

Transparansi informasi dan sosialisasi Dana Desa merupakan aspek krusial yang memengaruhi efektivitas penggunaan anggaran pembangunan di tingkat kampung, termasuk di Kampung Besum. Ketika informasi mengenai alokasi, perencanaan, dan realisasi Dana Desa tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, maka partisipasi publik cenderung menurun dan berpotensi memunculkan kecurigaan terhadap pengelolaan anggaran. Menurut Prakosa (2021), transparansi dan sosialisasi yang efektif memungkinkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya, serta berperan aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan pembangunan desa. Di Kampung Besum, rendahnya intensitas sosialisasi kepada warga mengenai rencana kerja dan penggunaan dana menghambat terciptanya akuntabilitas kolektif. Oleh karena itu, keberhasilan penggunaan Dana Desa sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah kampung mampu menyampaikan informasi secara terbuka dan menjalin komunikasi dua arah dengan masyarakat penerima manfaat.

Transparansi informasi dan sosialisasi Dana Desa menjadi faktor penentu utama dalam menciptakan efektivitas pengelolaan Dana Desa, karena hal ini berkaitan langsung dengan tingkat keterlibatan masyarakat dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Di Kampung Besum, masih terdapat kesenjangan dalam penyampaian informasi yang menyebabkan masyarakat kesulitan memahami alur penggunaan dana, sebagaimana tergambar dalam kutipan wawancara yang menyatakan bahwa warga sering kali hanya mengetahui informasi melalui jalur informal seperti dari mulut ke mulut. Kurangnya sosialisasi secara langsung dan tidak meratanya akses

terhadap forum-forum desa menyebabkan rendahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap program yang dibiayai oleh Dana Desa. Padahal menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan desa harus dimulai dari keterbukaan informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas sosial. Selain itu, Mutaqin dan Kholifah (2020) menegaskan bahwa transparansi anggaran tidak hanya menciptakan efisiensi penggunaan dana, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, yang pada akhirnya mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.

Minimnya transparansi dan lemahnya intensitas sosialisasi di Kampung Besum memperlihatkan bahwa efektivitas Dana Desa tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah dana yang dikururkan, tetapi lebih pada tata kelola dan komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah kampung. Dalam konteks ini, ketidakterlibatan warga dalam forum-forum resmi maupun tidak adanya media informasi visual seperti papan informasi yang selalu diperbarui menunjukkan lemahnya implementasi prinsip partisipatif dalam pembangunan desa. Sebagaimana dijelaskan oleh Tamburaka (2018), sosialisasi yang baik harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga pada saat pelaksanaan dan pelaporan, sehingga membangun kontrol sosial yang efektif dari warga terhadap penggunaan Dana Desa. Ketiadaan sistem penyampaian informasi yang transparan menciptakan ruang bagi penyimpangan dan menurunkan efektivitas pengawasan masyarakat, yang seharusnya menjadi benteng awal dalam mencegah penyalahgunaan dana publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan efektivitas Dana Desa, pemerintah kampung di Besum perlu memperkuat sistem komunikasi dua arah dengan warga dan membangun mekanisme transparansi berbasis komunitas yang mudah diakses dan dipahami oleh semua elemen masyarakat.

9. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan di tingkat kampung merupakan elemen penting yang memengaruhi efektivitas penggunaan Dana Desa, termasuk di Kampung Besum. Ketika warga dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana cenderung meningkat, serta risiko penyimpangan dapat diminimalisir. Menurut Suryanto dan Fahmi (2020), partisipasi masyarakat yang kuat akan mendorong sense of ownership terhadap program, meningkatkan efisiensi pelaksanaan, dan menciptakan kontrol sosial yang efektif dalam penggunaan anggaran desa. Namun, rendahnya kapasitas literasi anggaran, minimnya akses informasi, serta budaya birokratis yang tertutup seringkali menjadi penghambat partisipasi yang bermakna. Oleh karena itu, efektivitas penggunaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah kampung mampu menciptakan ruang partisipatif yang inklusif dan transparan bagi seluruh warga.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Dana Desa di Kampung Besum menunjukkan adanya keterlibatan aktif warga dalam tahap perencanaan hingga pelaksanaan fisik, seperti pembangunan infrastruktur dasar. Hal ini sesuai dengan pandangan Arnstein (1969) dalam Ladder of Citizen Participation yang menekankan pentingnya partisipasi sebagai bentuk kekuasaan warga dalam menentukan arah pembangunan. Keterlibatan ini juga memperkuat sense of ownership, meningkatkan efisiensi, serta mempercepat respons pemerintah kampung terhadap kebutuhan riil masyarakat (Suryanto & Fahmi, 2020). Namun, partisipasi bermakna tidak cukup hanya pada tataran pelaksanaan teknis; efektivitas penggunaan Dana Desa juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan warga untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh siklus program. Dalam konteks ini, faktor penghambat seperti rendahnya literasi anggaran, terbatasnya informasi publik, dan budaya birokratis yang hierarkis menjadi hambatan struktural yang membatasi keterlibatan warga secara menyeluruh (Winarno, 2012).

Meskipun pelibatan warga dalam pelaksanaan cukup kuat, pengawasan masih lemah karena kurangnya sosialisasi dan sistem pelaporan yang efektif dan mudah diakses. Ini memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi publik dan mekanisme akuntabilitas yang partisipatif belum berjalan optimal, padahal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan pentingnya pengawasan berbasis masyarakat sebagai instrumen tata kelola yang baik. Partisipasi dalam pengawasan hanya bisa berjalan apabila masyarakat memiliki pemahaman yang cukup serta rasa aman untuk menyampaikan kritik tanpa rasa takut akan konsekuensi sosial atau politis. Hal ini menegaskan pentingnya membangun kapasitas warga dan memperkuat kelembagaan lokal agar partisipasi dalam pengawasan menjadi bagian integral dari pengelolaan Dana Desa (Dwiyanto, 2008). Oleh karena itu, efektivitas Dana Desa di Kampung Besum tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan teknis warga, tetapi juga oleh keberhasilan menciptakan sistem sosial-politik lokal yang mendorong transparansi, keberanian menyampaikan aspirasi, dan budaya evaluatif dari bawah ke atas.

10. Dukungan pemerintah daerah dan koordinasi antar-lembaga

Efektivitas penggunaan Dana Desa di Kampung Besum sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah daerah dan koordinasi antar-lembaga. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan arahan strategis, bimbingan teknis, serta pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, yang dapat meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara efektif dan akuntabel. Selain itu, koordinasi yang harmonis antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga terkait lainnya menciptakan komunikasi dua arah yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa program pembangunan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan dapat

menghambat efektivitas penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan desa melalui koordinasi yang baik menjadi kunci dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Dukungan pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penggunaan Dana Desa di Kampung Besum karena memberikan kerangka strategis dan sumber daya pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan program pembangunan. Sebagaimana ditegaskan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, peran kabupaten/kota sangat krusial dalam memberikan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Informan menyebutkan bahwa pelatihan dan pendampingan teknis telah disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, namun efektivitasnya seringkali terhambat oleh lemahnya sistem penyampaian informasi, terutama ketika terjadi perubahan regulasi pusat. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan tidak hanya cukup dalam bentuk program teknis, tetapi juga perlu ditunjang dengan sistem komunikasi dan transfer pengetahuan yang responsif dan tepat waktu. Kapasitas teknis dan manajerial perangkat desa meningkat secara signifikan ketika ada dukungan aktif dan berkelanjutan dari pemerintah daerah melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Koordinasi antar-lembaga merupakan faktor kunci yang mendukung keberhasilan pemanfaatan Dana Desa, karena keberadaan banyak aktor seperti pemerintah kampung, BPD, distrik, dinas teknis, dan pendamping lokal menuntut adanya sistem kerja yang sinkron dan kolaboratif. Wawancara mengindikasikan bahwa kendala utama dalam koordinasi ini adalah tidak optimalnya alur komunikasi dan distribusi informasi lintas lembaga, terutama ketika menyangkut kebijakan baru yang belum terdiseminasi dengan baik ke level kampung. Menurut Dwiyanto (2008), efektivitas koordinasi dalam pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kejelasan peran masing-masing aktor, mekanisme kerja yang saling terhubung, dan frekuensi komunikasi yang memadai. Ketika koordinasi berjalan tidak rutin dan tidak terarah, maka proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan desa menjadi terhambat, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap keberhasilan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, memperkuat koordinasi antar-lembaga melalui forum komunikasi reguler dan integrasi sistem informasi desa menjadi strategi penting dalam mengatasi fragmentasi peran dan meningkatkan efektivitas Dana Desa di Kampung Besum.

4. SIMPULAN

Pemanfaatan Dana Desa di Kampung Besum secara nyata telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, maupun peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Program-program seperti pembangunan jalan kampung, penyediaan air bersih, pelatihan keterampilan, dan bantuan usaha kecil telah menunjukkan dampak langsung terhadap kualitas hidup warga. Masyarakat Kampung Besum merasakan manfaat Dana Desa secara menyeluruh, terutama dalam aspek aksesibilitas, kesehatan, dan penguatan ekonomi rumah tangga. Partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah kampung menjadi kunci keberhasilan dalam menentukan prioritas program, yang mencerminkan pendekatan pembangunan partisipatif dan berkeadilan.

Namun demikian, efektivitas penggunaan Dana Desa masih menghadapi tantangan struktural, terutama dalam hal kapasitas sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan yang terbatas. Keterlambatan pencairan dana dan kelemahan administrasi pelaporan menjadi hambatan dalam optimalisasi program. Oleh karena itu, penguatan tata kelola Dana Desa perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi aparat kampung, digitalisasi sistem keuangan desa, serta evaluasi berkala berbasis kebutuhan lokal. Dengan mekanisme yang lebih akuntabel dan inklusif, Dana Desa dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, merata, dan kontekstual, khususnya di wilayah-wilayah adat seperti Kampung Besum yang memiliki karakteristik sosial budaya yang khas.

Dengan demikian, Dana Desa di Kampung Besum telah memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Realisasi penggunaan dana yang tinggi pada program-program prioritas seperti pemberdayaan masyarakat dan layanan dasar (100%) mencerminkan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari tantangan yang masih perlu ditangani, seperti keterlambatan pencairan dan kapasitas administrasi yang terbatas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dana Desa memiliki potensi transformatif yang kuat apabila ditopang oleh tata kelola yang transparan, partisipatif, dan didukung oleh peningkatan kapasitas aparat desa. Integrasi antara efektivitas program dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberlanjutan pemanfaatan Dana Desa untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan di Kampung Besum.

REFERENSI

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Chambers, R. (1994). *Participatory Rural Appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm*. *World Development*, 22(10), 1437–1454. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90030-2](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90030-2)
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hermana, B., Silfianti, W., & Arfianto, D. (2021). *Membangun akuntabilitas desa: Peran partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Bina Praja*, 13(1), 23–34. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.23-34>
- Hidayat, R., & Firmansyah, M. (2019). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 77–92.
- Kemenkeu. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Liani, Y., Takari, D., & Ompusunggu, D. P. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11), 4810-4825.
- Mutaqin, T., & Kholifah, N. (2020). *Peran Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 45–52. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.010.02.5>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Boston: Pearson.
- Prakosa, G. A. (2021). *Transparansi Informasi Publik dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, 10(2), 134–147. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/39457>
- Pranadji, S. (2016). *Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa: Evaluasi Penggunaan Dana Desa*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Litbang Pertanian.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. (2011). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi empiris di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 8(1), 79–97. <https://doi.org/10.21002/jaki.2011.05>
- Sujarwoto. (2017). Village funds program and local governance in Indonesia: Institutionalizing accountability and transparency. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(1), 45–59. <https://doi.org/10.22146/jsp.26433>
- Suriadi, A. (2021). Evaluasi efektivitas penggunaan Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 8(1), 1–12. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jekpi/article/view/4580>

- Suryanto, T., & Fahmi, A. (2020). *The influence of community participation and village apparatus capacity on village fund management in Indonesia*. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(2), 135–149. Retrieved from https://www.ijicc.net/images/vol13iss2/13211_Suryanto_2020_E_R.pdf
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and Rural Development in Indonesia: The Role of Village Fund Program*. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(1), 25–34. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2017.1.1.25-34>
- Tamburaka, S. (2018). *Strategi Sosialisasi dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 211–220. <https://doi.org/10.26858/jiap.v8i2.6579>
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. United Nations Development Programme.
- Vel, J., Zakaria, Y., & Bedner, A. (2020). *Law-Making as a Strategy for Change: Indonesia's New Village Law*. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21(3), 222–240. <https://doi.org/10.1080/14442213.2020.1760731>
<https://doi.org/10.22146/jsp.22421>
- Widianingsih, I. (2010). *Participatory Planning in Decentralized Indonesia: Seeking a New Path to Democratic Development*. *Policy and Society*, 29(4), 331–342. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2010.09.003>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- World Bank. (2014). *Indonesia: Village Innovation Program Improves Governance and Services*. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/results/2014/04/14/indonesia-village-innovation-program-improves-governance-services>
- World Bank. (2020). *The Promise of Community-Driven Development in Indonesia: A Review of the PNPB Program*. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/387501526797182183/the-promise-of-community-driven-development-in-indonesia-a-review-of-the-pnpm-program>